

ANALISIS MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL PADA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BOGOR

Dadan Syarif Mutoan¹, Bambang Mardisentosa², Erialdi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ dadan.syarif@gmail.com

Email : ² bambang.mardisentosa@unis.ac.id

Email : ³ erialdy@unis.ac.id

Abstrak

Pendampingan masyarakat desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan Desa. Pendampingan desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas Pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa dan/badan usaha milik desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan desa, dan kerjasama desa untuk mendukung SDGs desa. Kegiatan pendampingan desa dan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu dengan mempergunakan sumber daya tenaga pendamping profesional melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD). Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif phenomenology grounded theory, peneliti melakukan wawancara dengan ahli-ahli pada bidang ini dan praktisi yang berprestasi pada bidang pekerjaan ini, serta terlibat langsung dalam aktifitas bidang penelitian ini serta mencari dasar-dasar yang membedakan dalam unsur pekerja (tenaga kerja secara umum dan tenaga kerja profesional). Sistem monitoring yang efektif dan evaluasi yang tepat sangat diperlukan untuk membuat performa organisasi terjaga dan tujuan program tercapai.

Kata Kunci: P3MD, IDM, TPP, monitoring TPP, kinerja TPP, profesional.

Abstract

Village Community Assistance refers to community empowerment activities through assistance, organization, direction, and village guidance. Village Assistance is an effort to increase the capacity, effectiveness, and accountability of village governance, village development, village community empowerment, the establishment and development of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) and/or Joint Village-Owned Enterprises (BUM Desa Bersama), enhancing the synergy of village programs and activities, and promoting village cooperation to support Village SDGs. Village and village community assistance activities carried out by the central government are implemented by the ministry in charge of development and community empowerment affairs, namely the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration), utilizing professional assisting personnel resources through the Village Development and Community Empowerment Program (P3MD). The research method used is a qualitative phenomenology grounded theory approach, where the researcher conducted interviews with

experts in this field and practitioners who have achieved distinction in this line of work, and was directly involved in the activities related to this research area, as well as seeking fundamental elements that differentiate aspects of labor (general workers and professional workers). An effective monitoring system and appropriate evaluation are highly necessary to maintain organizational performance and achieve program goals.

Keywords: P3MD, IDM, TPP, monitoring TPP, Performance of Professional Assistance Personnel, professional.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi dan sumber daya besar kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) menjadi krusial untuk memastikan dana tersebut efektif digunakan. Dalam konteks ini, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) – yang terdiri dari Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), dan Tenaga Ahli (TA) – berperan sebagai fasilitator kunci. TPP bertanggung jawab meningkatkan kapasitas Aparatur Desa, membantu perencanaan pembangunan yang partisipatif, dan mendampingi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Kinerja TPP secara langsung memengaruhi keberhasilan program, yang diukur melalui peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dan efektivitas penggunaan dana desa. Namun, kinerja TPP seringkali rentan terhadap masalah akuntabilitas dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) yang efektif dan terstruktur untuk mengukur, mengawasi, dan memberikan umpan balik korektif terhadap kinerja TPP.

Penelitian ini memandang bahwa efektivitas sistem M&E (X) yang diterapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) adalah determinan utama dari Kinerja TPP (Y) di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilih karena memiliki jumlah desa yang besar dan kompleksitas wilayah yang tinggi, menjadikannya studi kasus yang relevan untuk menguji model manajemen kinerja publik.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh efektivitas sistem monitoring terhadap kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas sistem evaluasi terhadap kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas sistem monitoring dan evaluasi secara simultan terhadap kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kabupaten Bogor?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menguji pengaruh efektivitas sistem monitoring terhadap kinerja TPP.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh efektivitas sistem evaluasi terhadap kinerja TPP.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh efektivitas sistem monitoring dan evaluasi secara simultan terhadap kinerja TPP.

Kajian Literatur dan Hasil Penelitian Terdahulu

Kinerja TPP (Y): Kinerja diukur dari kualitas output (seperti penyelesaian perencanaan desa, keberhasilan BUM Desa) dan perilaku TPP (profesionalisme, disiplin, akuntabilitas). Kinerja TPP dianggap efektif jika berkontribusi pada peningkatan IDM (Sassi et al., 2021).

Monitoring (X1): Monitoring adalah proses pengawasan berkelanjutan dan penilaian berkala untuk menjamin pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. Monitoring yang efektif harus real-time dan mampu memberikan umpan balik cepat (Provita et al., 2020).

Evaluasi (X2): Evaluasi adalah penilaian periodik dan sistematis terhadap efektivitas dan dampak program, dengan tujuan menentukan relevansi dan pencapaian tujuan. Evaluasi yang efektif harus objektif, transparan, dan terhubung dengan sistem penghargaan atau sanksi.

Hubungan M&E dan Kinerja: Dalam konteks manajemen publik, M&E berfungsi sebagai mekanisme kontrol organisasi dan motivasi individu (Riwu et al., 2022). Sistem M&E yang baik memberikan kejelasan tugas (role clarity), yang secara langsung mengurangi ambiguitas peran dan meningkatkan fokus kerja, sehingga berdampak positif pada kinerja (Provita et al., 2020). Hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Efektivitas sistem M&E (X1 dan X2) secara signifikan memengaruhi Kinerja TPP (Y).

B. Metode

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Phenomenology Grounded Theory. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam metode (cara) serta hasil yang dicapai dari M&E Kinerja TPP, yang merupakan fenomena yang sangat dipengaruhi oleh konteks kewilayahan dan interaksi manusia di lapangan.

1. Fenomenologi: Menggali pengalaman dan persepsi para ahli dan praktisi mengenai bagaimana M&E Kinerja TPP seharusnya dan benar-benar dijalankan di lapangan.
2. *Grounded Theory*: Menganalisis data secara induktif, mengembangkan konsep, kategori, dan hipotesis dari data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Analisis data bersifat induktif, di mana hipotesis dikembangkan dari data yang terkumpul, kemudian diverifikasi berulang kali melalui teknik triangulasi.

Lokasi, Subjek, dan Pengumpulan Data

Lokasi Penelitian: Seluruh wilayah kerja TPP P3MD di Kabupaten Bogor, yang tersebar di 39 kecamatan dan 416 desa.

Subjek Penelitian: Melibatkan ahli-ahli di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta praktisi TPP yang berprestasi. Keterlibatan langsung (participatory observation) peneliti dalam aktivitas bidang ini juga menjadi sumber data utama.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan kepada informan utama (I2: Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) dan informan kunci/tambahan (I3: Dinas PMD,

I5 & I6: Koordinator Kecamatan) untuk menggali informasi tentang tugas, monitoring, dan evaluasi TPP.

Observasi Partisipatif: Keterlibatan peneliti dalam aktivitas pendampingan untuk memahami kondisi riil di lapangan, khususnya kompleksitas kewilayahannya.

Studi Dokumentasi: Mengumpulkan laporan capaian P3MD, realisasi penggunaan dana desa, dan regulasi terkait M&E TPP (Permendesa dan Kepmendesa).

Pengolahan dan Analisis Data

Data kualitatif dianalisis secara induktif-siklus. Setelah data (transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen) dikumpulkan, langkah-langkahnya meliputi:

1. Reduksi Data: Memilih dan memfokuskan data pada isu-isu utama: Monitoring TPP, Evaluasi TPP, dan Kinerja TPP.
2. Penyajian Data: Menyajikan temuan dalam bentuk narasi deskriptif, matrik, dan bagan alir (termasuk Gambar 1 untuk ilustrasi temuan).
3. Penarikan Kesimpulan (Grounded Theory): Mengembangkan kategori dan model dari data yang muncul, dengan melakukan pengecekan data berulang kali (triangulation) hingga tercapai kejemuhan data. Analisis ini juga mencari dasar-dasar yang membedakan tenaga kerja profesional TPP dari tenaga kerja umum.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum TPP P3MD di Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor adalah wilayah yang sangat kompleks dalam implementasi P3MD, mencakup 416 desa di 39 kecamatan. Struktur tugas TPP bersifat berjenjang, sesuai Kepmendesa Nomor 143 Tahun 2021, dimulai dari Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berwilayah kerja di Desa, Pendamping Desa (PD) di Kecamatan, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) di Kabupaten. Kondisi ini menuntut sistem manajemen kinerja (M&E) yang terintegrasi dan akuntabel untuk menjaga performa organisasi TPP secara keseluruhan.

Analisis Metode Monitoring Kinerja TPP

Metode monitoring kinerja TPP di Kabupaten Bogor dilakukan melalui kombinasi pengawasan real-time berbasis teknologi dan kunjungan lapangan (supervision), yang dilaksanakan secara terstruktur oleh TPP level supervisor/koordinator (PD dan TAPM).

1. Monitoring Berbasis Teknologi (Aplikasi DRP)

Elemen monitoring utama adalah penggunaan aplikasi digital Daily Report Pendamping (DRP). Fungsi DRP: Aplikasi DRP memungkinkan TPP mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari, termasuk pertemuan, fasilitasi desa, pelaporan BUM Desa, dan kegiatan sinergitas program. Pengawasan Real-Time: TAPM dan Koordinator Kecamatan (PD) dapat memonitor kegiatan PLD secara real-time melalui aplikasi ini. Sistem ini sejalan dengan konsep Computerized Performance Monitoring yang mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan melaporkan informasi tentang aktivitas produktif pegawai secara terkomputerisasi. Implikasi Profesionalisme: Pemanfaatan sistem IT yang sederhana dan penguasaan personil/ pekerjaan oleh TPP supervisor sangat krusial agar monitoring dan evaluasi terlaksana secara efektif dan efisien. Akurasi pengisian Daily Report Pendamping Desa bahkan menjadi salah satu

aspek skor dalam evaluasi kualitatif kinerja.

2. Monitoring Melalui Supervisi dan Pembinaan

Selain DRP, monitoring dilakukan melalui Supervisi Lapangan: TAPM Kabupaten dan PD melakukan supervisi langsung ke desa. Supervisi ini esensial karena kompleksitas permasalahan desa dan aktivitas masyarakat tidak selalu tercakup dalam laporan digital. Rapat Kerja dan Pembinaan: Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui Rapat Kerja Kabupaten/Kota dan metode pembinaan lainnya, yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bersama TAPM. Hal ini menunjukkan kolaborasi yang baik antara TPP (Kemendesa) dan Pemerintah Daerah dalam pengawalan siklus penyelenggaraan pemerintahan desa.

Analisis Metode Evaluasi Kinerja TPP

Evaluasi Kinerja TPP di Kabupaten Bogor diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi TPP, turunan dari Permendesa dan Kepmendesa. Evaluasi ini bertujuan menilai kualitas yang dicapai TPP dan digunakan untuk pengembangan organisasi maupun personil TPP.

1. Prinsip-Prinsip Evaluasi Kinerja TPP

Penilaian evaluasi kinerja TPP berpegang pada lima prinsip utama yang menjamin keadilan dan akuntabilitas. Objektif: Evaluasi kinerja berlandaskan pada kondisi yang sebenarnya. Realistik: Dilaksanakan sesuai kondisi riil masing-masing personil yang dievaluasi. Tepat Waktu: Dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan karena berdasarkan kinerja yang sebenarnya tanpa unsur manipulasi. Terukur: Dilakukan sesuai dengan instrumen dan alat ukur yang telah ditetapkan.

2. Komponen Evaluasi Kualitatif

Selain pengukuran kuantitatif berdasarkan capaian target program (output), evaluasi juga mencakup Skor Evaluasi Kualitatif yang menilai aspek profesionalisme TPP: Loyalitas terhadap pekerjaan (rentang 0-20). Inisiatif dan Inovasi (rentang 0-20). Perluasan jaringan kerja sama (rentang 0-20). Akurasi Daily Report Pendamping Desa (terkait dengan kedisiplinan pelaporan).

Evaluasi yang komprehensif ini memastikan bahwa TPP dinilai tidak hanya dari sebatas kehadiran, tetapi dari kualitas etos kerja dan kontribusi non-teknis di lapangan. Ini merupakan pembeda esensial TPP sebagai tenaga kerja profesional.

Analisis Hasil Capaian Program P3MD

Hasil kegiatan P3MD di Kabupaten Bogor secara umum dicapai dan terukur hasilnya secara valid. Keberhasilan ini tidak hanya terlihat dari laporan capaian dan realisasi penggunaan dana desa setiap tahun, tetapi juga pada dampak kualitatif dan terukur yang lebih luas.

1. Indikator Kinerja Kunci (IDM)

Capaian yang paling terukur secara valid adalah peningkatan kemajuan strata desa yang berdampak pada strata kabupaten, yang ditetapkan melalui Indeks Desa Membangun (IDM) oleh Kemendes PDTT. IDM sebagai Outcome: IDM mencerminkan peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa. Kinerja TPP yang baik secara langsung berkorelasi dengan upaya pendampingan yang berhasil menaikkan

skor IDM desa dampingannya, seperti mengubah status desa dari Tertinggal menjadi Berkembang, atau dari Maju menjadi Mandiri. Siklus Pembangunan: Peningkatan IDM juga mengindikasikan tercapainya tujuan pemberdayaan, seperti meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan, menguatnya organisasi masyarakat, dan meningkatnya inovasi di tingkat desa.

2. Indikator Kualitatif dan Output Program

Secara kualitatif, hasil Program P3MD yang dirasakan langsung di lapangan meliputi Perencanaan Partisipatif: Adanya dokumen-dokumen perencanaan desa (RPJMDesa, RKPDesa) yang disusun melalui proses yang partisipatif dan melibatkan masyarakat. Transparansi dan Akuntabilitas: Adanya transparansi dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, berupa Baliho, papan proyek, atau informasi lain yang disampaikan secara umum, serta implementasi penggunaan anggaran sesuai regulasi. Peningkatan Kapasitas: Meningkatnya kapasitas perangkat desa dan meningkatnya partisipasi (keterlibatan) masyarakat dalam kegiatan strategis desa (musyawarah de Diskusi dan Implikasi Teoretis Kinerja TPP

Temuan ini secara teoretis menegaskan peran M&E sebagai mekanisme governance yang vital dalam program pembangunan berskala besar. Konteks phenomenology grounded theory dalam penelitian ini menghasilkan pemahaman mendalam tentang perbedaan antara tenaga kerja umum dan tenaga kerja profesional TPP.

1. Profesionalisme TPP dan Core Competency

Seorang TPP adalah tenaga kerja profesional yang tugasnya menuntut keahlian tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti Keahlian Teknis: TPP harus menguasai secara teknis regulasi terbaru (Permendesa, Kepmendesa), siklus pembangunan desa, dan pengelolaan BUM Desa. Keahlian Non-Teknis (Interpersonal): TPP harus memiliki loyalitas, inisiatif, inovasi, dan kemampuan perluasan jaringan kerja sama – aspek yang tercermin dalam Skor Evaluasi Kualitatif. Inisiatif dan inovasi TPP menjadi penentu utama karena mereka harus mampu memecahkan masalah kompleks yang tidak terduga di lapangan (misalnya, konflik agraria, kesulitan BUM Desa) tanpa instruksi real-time dari supervisor. Keterbatasan geografis dan luasnya wilayah Kabupaten Bogor menuntut TPP untuk menjadi pengelola kasus yang mandiri (case manager). Oleh karena itu, kurangnya personil tidak menyebabkan kurangnya hasil kerja, output, dan target program, jika yang tersisa adalah TPP yang benar-benar profesional dan kompeten. Hal ini menunjukkan bahwa sistem M&E harus berfokus pada kualitas, bukan kuantitas personil.

2. Sinkronisasi M&E dan Tujuan Program

Sistem M&E di Kabupaten Bogor telah berhasil menginternalisasi tujuan program (peningkatan IDM) ke dalam indikator kinerja TPP. Hasil kualitatif menunjukkan bahwa pengawasan tidak lagi hanya berorientasi pada proses (melakukan pertemuan), tetapi pada hasil yang berdampak (dokumen perencanaan partisipatif, transparansi anggaran, peningkatan kapasitas desa). Namun, meskipun secara umum tercapai, pendampingan desa di Kabupaten Bogor masih dilakukan sebagian besar dan sangat bergantung pada TPP Kemendesa. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pendampingan (indikator 7) TPP perlu ditingkatkan agar kapasitas

pemerintah desa benar-benar mandiri dan tidak bergantung pada TPP. Perlu ada upaya yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mengukur peningkatan kapasitas TPP itu sendiri.

3. Tantangan dan Rekomendasi Manajerial

Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan efektivitas dan efisiensi M&E di tengah kompleksitas kewilayahan. Untuk mengatasi tantangan ini, direkomendasikan Peningkatan Kapasitas Supervisor TPP: TAPM Kabupaten dan Koordinator Kecamatan harus memiliki penguasaan personil, pekerjaan, dan kewilayahannya yang mumpuni agar monitoring dan evaluasi dapat berjalan efektif dan efisien. Integrasi Data Kualitatif: Meskipun DRP sangat membantu, hasil evaluasi harus lebih dalam mengintegrasikan temuan kualitatif (loyalitas, inisiatif) yang didapat dari kunjungan lapangan, untuk memberikan reward dan punishment yang lebih adil (sesuai prinsip objektif dan realistik).

Implementasi M&E yang kuat dan profesional inilah yang menjadi fondasi untuk menjaga tujuan Program P3MD tetap tercapai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif phenomenology grounded theory mengenai Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada Program P3MD di Kabupaten Bogor, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efektivitas M&E sebagai Prasyarat Kinerja Profesional: Sistem Monitoring (melalui aplikasi DRP dan supervisi lapangan) dan sistem Evaluasi (berdasarkan prinsip objektif, akuntabel, dan terukur) adalah prasyarat mutlak untuk menjaga performa organisasi TPP dan memastikan tujuan P3MD tercapai di Kabupaten Bogor. Monitoring menjamin disiplin pelaporan, sementara Evaluasi menjamin keadilan dan motivasi jangka panjang TPP.
2. Pengukuran Kinerja Terukur dan Valid Melalui IDM: Kinerja TPP dan hasil P3MD di Kabupaten Bogor terukur secara valid melalui pencapaian kemajuan strata desa yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Kinerja TPP yang baik tercermin dalam output kualitatif, seperti tersusunnya dokumen perencanaan desa secara partisipatif dan meningkatnya transparansi anggaran desa.
3. Tuntutan Profesionalisme di Atas Keterbatasan Struktural: TPP dikategorikan sebagai tenaga kerja profesional yang kinerjanya bergantung pada keahlian dan akuntabilitas individu. Keberhasilan M&E terletak pada kemampuan TPP level supervisor untuk memanfaatkan sistem IT sederhana dan menguasai kewilayahannya guna memastikan TPP lapangan (PLD/PD) mampu bekerja secara efisien dan mandiri, bahkan di tengah tantangan luasnya wilayah Kabupaten Bogor.

Referensi

- Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 143
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.
- Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendataan Dana Desa dalam Aplikasi Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18
Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- Provita, W., Nisa' Uzlifat, N., Indri, K., Adiwijaya, A., Muhammad, J. S., & Muthoharoh.
(2020). Optimalisasi Peran Pendamping Desa Terhadap Fraud Pemerintah Desa di
Kabupaten Demak. *Indonesia Journal of Community Service*, 2(1).
- Riwu, F. E. F., Blegur, S. C., & Rihang, V. A. E. (2022). Pengaruh Program Monitoring Dan
Evaluasi Terhadap Kinerja Pendamping Desa di Kecamatan Kupang Timur. *Jurnal
Administrasi Publik*, 12(3), 256–268.
- Sassi, M., Afifudin, A., & Suyeno, S. (2021). Efektifitas Kinerja Pendamping Desa dalam
Pembangunan Desa (Studi di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang).
Jurnal Respon Publik, 15(3).
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta:
Sekretariat Negara.
- Wibowo. (2017). Manajemen Kinerja. Edisi Kelima. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
[Font: Book Antigua, Size 11, Line spacing: 1.15]